



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SITTI JOHAR
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 66327

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	430.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/130 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
2. Tanah Seluas 3.000 m2 di KAB / KOTA BANTAENG, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000		
3. Tanah Seluas 6.095 m2 di KAB / KOTA BANTAENG, WARISAN Rp. 45.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	179.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA RUSH JEEP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	194.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	813.000.000
III. HUTANG	Rp.	140.213.765
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	672.786.235

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.